



***LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN JANUARI 2025***

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KIPM MANADO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-NYA, kami dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat bulan Januari 2025 pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado.

Laporan bulanan ini disusun dalam rangka memberikan informasi dan gambaran tentang tentang hasil kegiatan pengaduan masyarakat kepada di BKIPM Manado, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi sepanjang bulan Januari 2025.

Harapan kami, laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan pada program kegiatan yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Manado, Januari 2025
Ketua Tim BKIPM Manado



Muhlin, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Dasar Hukum.....	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	6
2.1 Metode Pelaksanaan	6
2.1.1 Tim Pelaksana	6
2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan	6
2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana	6
2.2 Penanganan Pengaduan.....	7
2.3 Konsultasi dan Permintaan Informasi	8
2.4 Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	8
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	9
3.1 Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia	9
3.2 Sarana dan Prasarana	11
3.3 Permasalahan	11
3.4 Saran Perbaikan / Rekomendasi	11
BAB IV Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Sebelumnya	12
4.1 Saran / Rekomendasi Sebelumnya	12
4.2 Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya	13
BAB V PENUTUP	14
Lampiran	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintahan menjadi keluhan utama masyarakat. Ini disebabkan karena dalam proses pelayanan sering kali tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Padahal standar pelayanan minimal (SPM) dalam setiap instansi pemerintahan pasti ada. Inilah permasalahan dari implementasi penyelenggara pemerintahan.

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi yang memasuki tahun ke enam, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai pelayanan publik mengalami kemunduran.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur tentang tata cara penanganan aduan masyarakat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini memuat pedoman tentang siapa yang bisa memberikan aduan, kepada siapa aduan di sampaikan, tata cara penanganan aduan dan mekanisme penyampaian penanganan aduan.

1.2 Tujuan

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memaparkan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan selama bulan Januari tahun 2025. Tujuannya adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat serta memastikan bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat sudah dilaksanakan secara efektif.

1.3 Ruang Lingkup

Laporan disusun dalam rangka implementasi penanganan pengaduan masyarakat. Ruang lingkup pelaporan mencakup kegiatan yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan, tujuan kegiatan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan. Laporan ini menjelaskan status indikator sejauh mana masyarakat melakukan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Manado.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2023 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I Dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan
9. Surat Tugas Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Nomor 68/BKIPM.MDO/KP.440/II/2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat/*Whistleblower* pada Balai KIPM Manado.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Metode Pelaksanaan

2.1.1 Tim Pelaksana

Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh tim penanganan pengaduan masyarakat yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Nomor 68/BKIPM.MDO/KP.440/II/2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat/*Whistleblower* pada Balai KIPM Manado.

2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan

Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu bulan Januari 2025 di seluruh wilayah kerja BKIPM Manado.

2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang disediakan BKIPM Manado bagi Pengguna jasa/stakeholder yang akan menyampaikan pengaduan antara lain:

1. Website BKIPM Manado / Aplikasi www.lapor.go.id



2. Kotak Pengaduan



2.2 Penanganan Pengaduan

BKIPM Manado memiliki kewajiban untuk melaksanakan penanganan seluruh aduan dari masyarakat terkait permasalahan penerbitan Kesehatan Penjamin Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer, penerbitan Kesehatan Penjamin Mutu Hasil Perikanan Pasca Panen dan pemeriksaan uji mutu hasil perikanan yang pengelolaannya menjadi tugas dan fungsi BKIPM Manado serta berkomitmen untuk menangani seluruh aduan masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan BKIPM Manado. Berdasarkan resume hasil penanganan pengaduan masyarakat di Balai KIPM Manado, tidak terdapat pengaduan masyarakat pada bulan Januari tahun 2025 yang masuk melalui aplikasi LAPOR!.

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR! Pada Bulan Januari Tahun 2025

Substansi Pengaduan	Jumlah Pelaporan	Keterangan
Penerbitan Kesehatan Penjamin Mutu Hasil Perikanan Produksi Primer	0	
Penerbitan Kesehatan Penjamin Mutu Hasil Perikanan Pasca Panen	0	
Pemeriksaan Uji Mutu Hasil Perikanan	0	
Jumlah	0	

Berdasarkan tabel 1, tidak terdapat pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi LAPOR! di bulan Januari tahun 2025.

2.3 Konsultasi dan Permintaan Informasi

Selain menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat, Balai KIPM Manado menerima konsultasi maupun permintaan informasi dari pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi konsultasi maupun permintaan informasi ini untuk mengakomodir masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam pelayanan publik. Pada bulan Januari 2025 terdapat 2 kali konsultasi dan permintaan informasi yang dilakukan oleh pengguna jasa Balai KIPM Manado melalui tatap muka. Adapun konsultasi dan permintaan informasi pada bulan Januari tahun 2025 telah diselesaikan dengan tuntas oleh petugas penerima konsultasi.

Tabel. 2 Konsultasi dan Permintaan Informasi Pada Bulan Januari 2025

No	Tanggal	Nama Pengguna Jasa	Substansi Konsultasi	Tindak Lanjut	Media Konsultasi	Waktu tindak lanjut
1.	09 Januari 2025	Sihol Nainggolan	Konsultasi rencana sertifikasi HACCP komoditi rumput laut kering	Disarankan untuk melengkapi SKP dan aspek legal	Tatap Muka	Disaat konsultasi berlangsung
2.	21 Januari 2025	Marwansi PT. Bogi	Konsultasi menanyakan informasi terkait pengujian parameter Logam Berat dan Histamin	Sudah memberikan penjelasan terkait pengujian Logam Berat dan Histamin bisa dilakukan di Balai KIPM Manado	Tatap Muka	Disaat konsultasi berlangsung

2.4 Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Selain kegiatan penanganan pengaduan, juga telah dilakukan sosialisasi penanganan pengaduan secara internal melalui apel dan briefing pagi, rapat koordinasi dan media sosial. Beberapa kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat secara internal di Bulan Januari tahun 2025 yaitu pada tanggal 13 Januari 2025 dilaksanakan briefing dan apel pagi dipimpin oleh Kepala Balai KIPM Manado.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di Balai KIPM Manado telah dianalisa dan dilakukan identifikasi variabel pendukung keberhasilan pelaksanaan di tingkat implementasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan pengaduan masyarakat di Bulan Januari tahun 2025 adalah faktor kelembagaan, sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas tim penanganan pengaduan.

3.1 Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia

Kelembagaan dalam kegiatan pengaduan masyarakat menjadi unsur yang penting dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Pada tahun 2023, telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Balai KIPM Manado melalui Surat Tugas Kepala Balai KIPM Manado nomor : B. 68/BKIPM.MDO/KP.440/II/2025 tertanggal 4 Februari 2025. Adapun tugas dari Tim Penanganan Pengaduan Balai KIPM Manado adalah :

1. Melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
2. Memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
3. Memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
5. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
6. Menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin Unit Penyelenggara Penlayanan pada Unit Pelaksana Teknis;
7. Melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Kepala Balai KIPM Manado;
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
11. Membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala kepada Kepala Balai KIPM Manado

Adapun susunan Tim Penanganan Pengaduan Balai KIPM Manado tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhlin, S.Pi, M.Si	Kepala Balai KIPM Manado	Ketua
2.	Drh. Adhi Dharmawan	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Wakil Ketua
3.	Marfin Like Watung, S.Pi	Kasubbag Umum	Sekretaris
4.	Muhammad Hamka, Amd	Inspektur Mutu	Anggota
5.	Erwin Arba Aziz, S. Pi	Inspektur Mutu	Admin UPP

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pengaduan, tim penanganan pengaduan selalu berkoordinasi untuk menindaklanjuti laporan dari pegawai. Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan merupakan wujud tanggung jawab pelaksanaan kegiatan serta evaluasi terhadap pembentukan kelembagaan TPP sesuai amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/PERMEN- KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan /atau TPP UPT pada unit kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, BKIPM telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2023.

3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kegiatan penanganan pengaduan, Balai KIPM Manado juga melengkapi fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sarana dan prasarana yang tersedia antara lain ruang tamu, ruang konsultasi, poster, banner serta kotak pengaduan masyarakat. Layanan pengaduan masyarakat juga dapat disampaikan melalui media sosial milik Balai KIPM Manado yaitu :

1. Facebook (Bppmhkp Manado Sempurna)
2. Twitter (Bppmhkp Manado)
3. Instagram (bppmhkp_manado)
4. Whatsapp (0821-9592-2227)



3.3 Permasalahan

Pada bulan Januari tahun 2025, terdapat permasalahan yaitu pemahaman pegawai terhadap mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan korelasinya dengan ketentuan regulasi yang mengatur penanganan pengaduan masyarakat relatif masih kurang.

3.4 Saran Perbaikan / Rekomendasi

Saran Perbaikan/Rekomendasi Saran/rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya peningkatan pemahaman terkait pengaduan masyarakat kepada pegawai secara berkala dalam kegiatan sosialisasi baik secara tatap muka maupun daring. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan penyadartahuan maupun edukasi kepada pegawai terkait perlunya pengetahuan dasar tentang pengaduan masyarakat.

BAB IV

Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Sebelumnya

Monitoring merupakan proses pengumpulan data secara rutin sebagai bagian dari kegiatan, untuk membandingkan rencana dengan situasi nyata, sebagai bagian dari proses internal Balai KIPM Manado. Selain itu, monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta menggunakan sumberdaya secara tepat. Manfaat monitoring penanganan pengaduan masyarakat adalah sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan upaya perbaikan terus menerus terhadap sistem penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Manado serta usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam usaha pencapaian visi organisasi.

Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki, untuk mencapai tujuan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, pelaksanaan dan manfaat program serta kegiatan sebuah institusi.

Pelaporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan WBS disusun secara berkala setiap bulan. Laporan monitoring dan evaluasi adalah kompilasi perkembangan program selama satu bulan dilengkapi dengan hasil monitoring dan evaluasi. Laporan ini menjelaskan status indikator sejauhmana masyarakat dan stakeholder telah melaksanakan inisiasi pengaduan jika terdapat penyimpangan dalam organisasi sebagai tindakan nyata untuk menegakkan integritas.

4.1 Saran/ Rekomendasi Sebelumnya

Pada bulan Desember tahun 2024 terdapat saran/rekomendasi yang dihasilkan yaitu perlunya peningkatan pemahaman terkait pengaduan masyarakat kepada pegawai dalam kegiatan sosialisasi melalui briefing dan apel pagi maupun rapat. Internalisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan maupun edukasi kepada pegawai terkait perlunya pengetahuan dasar pegawai tentang pengaduan masyarakat.

4.2 Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Pada bulan Desember tahun 2024, telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi pada bulan Januari tahun 2025 yaitu adanya sosialisasi hasil rapat koordinasi penanganan pengaduan masyarakat melalui kegiatan briefing dan apel pagi. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 oleh Kepala Balai KIPM Manado. Selain itu, juga dilaksanakan sosialisasi melalui media sosial untuk memberikan penyadar tahanan kepada pegawai dan masyarakat luas tentang pentingnya penanganan pengaduan.

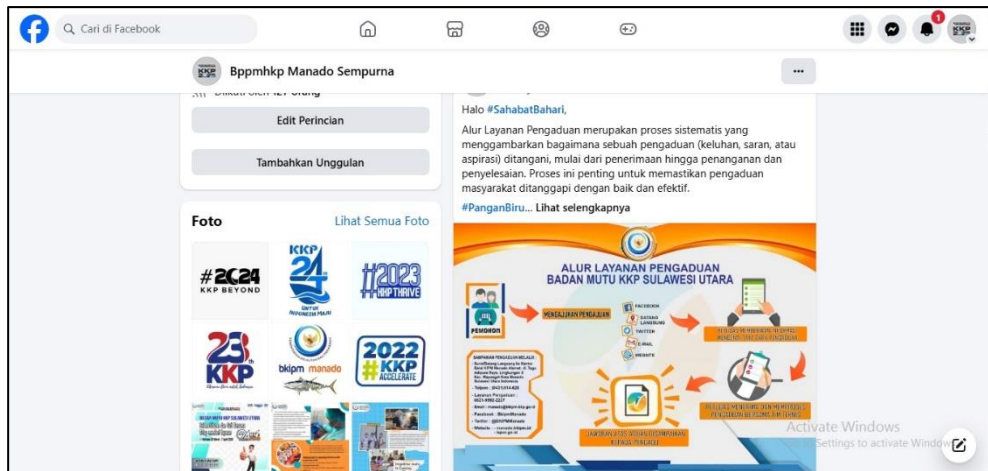
BAB V

PENUTUP

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat bulan Januari tahun 2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari tahun 2025 tidak terdapat pengaduan masyarakat yang masuk ke aplikasi LAPOR! melalui Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Balai KIPM Manado dan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tuntas.
2. Pada bulan Januari tahun 2025 terdapat konsultasi /permintaan informasi melalui tatap muka sebanyak 2 kali dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas.
3. Penanganan pengaduan masyarakat juga telah disosialisasikan secara internal melalui apel dan briefing pagi yang dilaksanakan secara daring dan tatap muka kepada pegawai maupun melalui media sosial.

Lampiran :
Hasil Tindak Lanjut



Notulen

Apel pagi, doa dan briefing Balai KIPM Manado

Tanggal 13 Januari 2025

Balai KIPM Manado melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai. Apel pagi dipimpin oleh Kepala Balai KIPM Manado.

Apel dilaksanakan secara langsung oleh pegawai, serta secara virtual meeting bagi pegawai yang lepas tugas maupun yang berkedudukan di laboratorium dan di Wilayah Kerja.

Pelaksana apel adalah Kelompok Umum, dengan rangkaian kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan teks pembukaan UUD 1945, pembacaan tek Panca Praasetya Korpri, amanat Pembina apel, menyanyikan Mars BKIPM, dan bersama.

Dalam amanatnya, Kepala Balai KIPM Manado menyampaikan beberapa hal, yaitu :

- (1) Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-nyalah kita dapat melaksanakan apel pagi dengan tugas sehari-hari dalam keadaan sehat;
- (2) Terima kasih kepada jajaran pegawai, yang telah turut serta berkontribusi dalam pencapaian kinerja Balai KIPM Manado
- (3) seluruh pegawaai agar selalu turut serta mendukung terwujudnya kualitas pelayanan publik, dan selalu menjaga integritas dalam pelaksaasn tugas dan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja serta pemenuhan sarana pendukung;
- (4) Kepala Balai menyampaikan tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkup BKIPM yang berisi pemaparan tentang implemetasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang penanganan Pengaduan Dilingkungan Kementerian dan Perikanan.
- (5) Kepala Balai menyampaikan juga tentang Penanganan Pengaduan yang di miliki oleh Balai KIPM Manado untuk Pengguna Jasa dan Masyarakat agar di ketahui oleh seluruh Pegawai Lingkup Balai KIPM Manado

Akhir Apel sebelum melakukan aktifitas, kita di pimpin doa dan semoga seminggu kedepan seluruh pegawai tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Notulen



Erwin



ABSEN APEL
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

TANGGAL

: 13 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Muhlin	Kc. Bali	
2.	MARFIN LIKE WATUNG	KASUBAG UMUM	
3.	DOKHY R	STAFF	
4.	Dolly N. Pauray	Kahmga	
5.	Achi D	Kahmga	
6.	Mariane V. Pondag	Kahmga	
7.	Budi Satriyo	STAFF	
8.	Deyis Lolong	STAFF	
9.	Muhammad Haulika	STAFF	
10.	ERWIN ARBA AZIZ	STAFF	
11.	Narendra A. Wamur	STAFF	
12.	Mega Indira Runtuwene	STAFF	
13.	MUDIYANTO SETIAWAN	STAFF	
14.	Meirin Bororing	STAFF	
15.	Regilian Sumual	STAFF	



ABSEN APEL
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

TANGGAL : 13 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	Paraf
16	Silke Pantouw	Staff	
17	Dwi piki Waurani	Staff	
18	Emmanuella . S. Pantow	Staff	
19	Agung Maslonan	Staff	
20	Hopwi Sari	Staff	
21	NOVI LINTAUB	Staff	